

Implementasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat (Studi Kasus Kesbangpol Kota Semarang)

Dony Vega Prayogo*¹ dan Novia Wahyu Wardhani²

^{1,2}Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Article History

Disubmit 20 Januari 2022

Diterima 30 Juni 2022

Diterbitkan 2 Juli 2022

Kata Kunci

pendidikan politik;
program;
masyarakat kota semarang

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Implementasi pendidikan politik bagi masyarakat Kota Semarang oleh Kesbangpol Kota Semarang 2) Faktor pendukung dan penghambat Kesbangpol Kota Semarang dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan di Kesbangpol Kota Semarang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diuji dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang diwujudkan dalam berbagai program diantaranya : pendidikan politik kewarganegaraan bagi masyarakat, lomba pemilihan ketua Osis, fasilitasi pemilu dan pilkada, fasilitasi Kampung Demokrasi Pancasila, dan edukasi pendidikan politik melalui sosial media. Program tersebut mempunyai sasaran berbagai kelompok masyarakat yang ada di Kota Semarang seperti parpol, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, organisasi perempuan, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya termasuk para pengguna media sosial. 2) Faktor pendukung Kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik ke masyarakat diantaranya yaitu dari segi sumber daya manusia yang sangat memadai, sumber daya finansial yang besar, dan juga kerjasama antar lembaga yang baik. Faktor penghambat Kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik ke masyarakat yaitu adanya refocusing anggaran dan juga pola pikir masyarakat yang kurang.

Abstract

The purpose of this study was to determine: 1) The implementation political education for the people of Semarang City by Kesbangpol Semarang Semarang City. 2) Supporting and inhibiting factors of Kesbangpol Semarang City in providing political education for the people of Semarang City. The research used in this study is qualitative. This research was conducted in Kesbangpol Semarang City. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Data tested by triangulation of sources. Data analysis techniques through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and data conclusions. The result of the research shows: (1) The implementation role of Kesbangpol in providing political education is realized through various program activities. The program of activities carried out included civic political education for the community, competition for the election of the chairman of the Student Council, facilitation of elections, facilitation of Pancasila Democracy Village, and political education through social media. The program targets various community groups in the city of Semarang such as political parties, mass organizations, religious leaders, community leaders, students, women's organizations, and various other community groups including social media users. To support its various programs, Kesbangpol Semarang City collaborations with various partner, both government and non-government elements. 2) The supporting factors for Kesbangpol in providing political education to the public include proper human resources, large financial resources, and also good institutional cooperation. The inhibiting factor for Kesbangpol in providing political education to the community is the refocusing of the budget and also the lack of community knowledge.

* E-mail: donyvega09@students.unnes.ac.id
Address: Gunungpati, Semarang, Indonesia, 50229

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak untuk setiap orang. Tak terkecuali dengan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan merupakan proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya (Khan:2010). Pendidikan terkait dengan proses penyaluran ilmu pengetahuan, serta perkembangan keterampilan & pelatihan yang membawa perubahan dalam diri individu. Sedangkan politik menyangkut dengan praktik kekuasaan, pengaruh, dan otoritas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif. Masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks dan dinamis, sehingga diperlukan pembelajaran politik yang berkesinambungan. Pengetahuan sejak dini mengenai berbagai komponen-komponen kenegaraan, sistem pemerintahan negara, hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara, pemilihan umum, dan segala seluk beluk mengenai politik dapat melahirkan manusia-manusia yang berkualitas dan berkapasitas serta memiliki arah dalam perbaikan bangsa dan negara. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. M. Nur Khoiron (1999) menyatakan bahwa pendidikan politik didalamnya terkandung intensitas untuk membentuk insan politik yang menyadari status dan kedudukannya ditengah masyarakat. Pendidikan politik merupakan usaha untuk membentuk manusia agar dapat menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam dunia politik. Pendidikan politik memiliki fungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung (Sumantri:2003). Pendidikan yang disengaja dan sistematis, diperlukan untuk dapat membentuk individu yang berkepribadian politik agar memiliki kesadaran politik serta mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat bangsa dan negara. Marita Ahdiyana (2009) menjelaskan bahwa pendidikan politik memiliki 3 tujuan, diantaranya : membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, serta bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada individu, agar individu tersebut menjadi partisipan politik dalam bentuk positif.

Di era sekarang ini, polarisasi politik di masyarakat masih cukup kuat. Hal ini bisa dilihat dari sering terjadinya konflik yang diakibatkan oleh politik itu sendiri. Perbedaan pilihan politik seringkali mengakibatkan perselisihan, perdebatan, bahkan tindakan-tindakan intoleran yang semestinya tidak terjadi. Beberapa pelaksanaan pemilihan umum sampai saat ini masih menyisakan polarisasi politik yang cukup berdampak kuat di masyarakat. Masyarakat masih "terkotak-kotakan" dengan adanya labelisasi kelompok yang disebut "Kadrun" dan "Cebong". Perdebatan seringkali terjadi baik itu di media sosial maupun kehidupan sehari-hari. Tak jarang hal tersebut tidak hanya melukai psikis, namun juga fisik. Hal tersebut menunjukkan dimana masyarakat belum memiliki kede-

wasaaan dalam berpolitik. Selain itu, masih banyak pula masyarakat yang mudah dimobilisasi oleh kepentingan elite politik mengakibatkan masyarakat memilih bukan karena kesadaran diri sendiri tetapi mengikuti pilihan tokohnya. Akibatnya disintegrasi bangsa rawan untuk terjadi, dimana antar orang dengan orang maupun antar kelompok masyarakat pendukung calon atau pasangan tertentu bergesekan atau saling sikut-menyikut akibat perbedaan pilihan politik. Padahal hal tersebut sangat merugikan diri masyarakat itu sendiri.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai politik juga berimplikasi terhadap kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini terjadi di berbagai daerah, salah satunya di Kota Semarang. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang menuturkan bahwa dalam 2 pilkada terakhir, partisipasi politik masyarakat Kota Semarang tidak pernah mencapai angka 70%. Padahal KPU Kota Semarang menargetkan angka partisipasi sebesar 77,5% , namun target tersebut sampai sekarang belum tercapai. Pada Pilkada Kota Semarang 2020 partisipasi pemilih 68,6% dan pada Pilkada Kota Semarang 2015 angka partisipasi hanya 65,9%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat masih kurang. Padahal berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Pemahaman masyarakat mengenai politik yang kurang, dapat mengakibatkan masyarakat enggan untuk terlibat dalam kehidupan politik, baik itu terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Banyak masyarakat yang nantinya justru akan menjadi apatis terhadap kehidupan berpolitik, karena terdapat anggapan bahwa politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan para pejabat, pimpinan, dan anggota partai politik. Selain itu kemungkinan dapat pula terjadi hal yang lebih dari itu, dimana masyarakat kurang memahami mengenai budaya politik dan kurang memiliki kesadaran politik sehingga bisa jadi masyarakat akan memilih golput (golongan putih) dalam pemilu. Selain adanya pemahaman politik yang kurang, tentunya banyak faktor lain yang menyebabkan masyarakat antipati maupun apatis terhadap dunia perpolitikan, salah satunya yakni dimana saat ini banyak para politisi yang tersandung dengan kasus korupsi. Budaya politik tersebut sebaiknya dihilangkan secara bertahap agar dapat diterima oleh masyarakat. Sebab jika korupsi terjadi terus menerus dapat mengakibatkan masyarakat untuk enggan menentukan figur yang akan mereka pilih untuk memperjuangkan nasibnya dan hal buruk pun tidak dapat dihindarkan dimana angka golput akan semakin meningkat. Jika persoalan-persoalan tersebut tidak segera teratasi, maka persoalan ini dapat menjadi antitesis terhadap cita-cita reformasi yaitu menyelenggarakan kekuasaan negara bagi kepentingan rakyat.

Berbagai fenomena yang terjadi di atas menimbulkan pemikiran baru bahwa pendidikan politik merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat diperlukan kerjasama dari berbagai elemen. Mulai dari elemen pemerintah dan elemen non-pemerintah. Salah satu elemen dalam pemerintah tersebut yaitu perangkat daerah dalam urusan pendidikan politik masyarakat. Pada setiap daerah terda-

pat unsur pelaksana urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang disebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang selanjutnya disebut Kesbangpol merupakan perangkat daerah dalam urusan pendidikan politik masyarakat Kota Semarang. Salah satu misi dari Kesbangpol Kota Semarang yaitu meningkatkan pendidikan politik masyarakat serta menerapkan budaya demokrasi yang berlandaskan etika dan moral. Penelitian bertujuan untuk mengetahui 1) Implementasi pendidikan politik bagi masyarakat oleh Kesbangpol Kota Semarang 2) Faktor pendukung dan penghambat Kesbangpol Kota Semarang dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan latar penelitian di Kesbangpol Kota Semarang. Penempatan fokus penelitian ini adalah: 1) Peran Kesbangpol Kota Semarang dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Semarang; 2) faktor pendukung dan penghambat Kesbangpol Kota Semarang dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Semarang. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman (1992: 1619) yang menyatakan bahwa dalam melakukan proses analisis komponen utama yang perlu diperhatikan setelah pengumpulan data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik merupakan salah satu hal yang paling penting, sebab permasalahan-permasalahan politik sangat kompleks dan cukup dinamis. Pentingnya suatu pendidikan politik bagi masyarakat membuat pendidikan politik terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu menyesuaikan perkembangan pola hidup masyarakat (Zubaidah & Munadi, 2020). Pendidikan yang disengaja dan sistematis, diperlukan untuk dapat membentuk individu yang berkepribadian politik agar memiliki kesadaran politik serta mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat bangsa dan negara. Partisipasi tidak hanya sebatas bagaimana masyarakat memberikan hak suara mereka saat pemilihan umum berlangsung. Namun partisipasi juga termanifestasi dalam bentuk yang lebih luas, yakni,

bagaimana publik terlibat dalam diskusi terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, bagaimana mereka terlibat dalam proses pembuatan keputusan, serta bagaimana mereka mengontrol pelaksanaan kebijakan dan program (Yoldaş, 2015; Prayudi, 2018; Husna & Fahrimal, 2021).

Kesbangpol Kota Semarang sebagai salah satu lembaga negara yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan politik terus berupaya untuk dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat Kota Semarang. Pelaksanaan pendidikan politik menjadi tanggung jawab secara khusus untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan masyarakat tentang politik (Taufik, Jamaludin, Juwandi : 2019). Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Kota Semarang diwujudkan melalui berbagai program kegiatannya. R. Hayer memandang pendidikan politik ialah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik (Kartono. 2009:64). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rusadi Kantaprawira (2004), dimana ia memandang bahwa pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara nasional dalam sistem politiknya. Pelaksanaan pendidikan politik oleh Kesbangpol bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kehidupan berdemokrasi dan peningkatan pengetahuan terkait kehidupan berpolitik sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Program Kegiatan Pendidikan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Dalam penyusunan program setiap bidang dituntut untuk selalu berinovasi setiap tahunnya. Hal ini dilakukan agar tidak monoton dan hanya menjadi kegiatan rutinan saja. Kesbangpol dalam melakukan penyusunan program juga memperhatikan masukkan-masukkan dari masyarakat. Masukkan dari masyarakat dijadikan pertimbangan Kesbangpol untuk melaksanakan programnya, sebab masyarakat sendiri yang merupakan sasaran utama dari pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kesbangpol sehingga masukan tersebut berguna untuk pelaksanaan program kedepannya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menyelenggarakan berbagai program kegiatan setiap tahunnya. Untuk program pendidikan politik dilaksanakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri pada Sub Bidang Budaya dan Pendidikan Politik. Program tersebut dirasa sangat penting sebab pendidikan politik perlu untuk terus diberikan ke masyarakat tidak hanya ketika mendekati pemilu maupun pilkada namun dapat diberikan setiap saat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana kehidupan demokrasi yang baik dengan berdasarkan demokrasi pancasila serta agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan dapat mempertanggungjawabkan segala sikap & perilaku politiknya.

Kesbangpol sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melaksanakannya melalui berbagai program diantaranya program pendidikan politik kewarganegaraan bagi masyarakat, program lomba

pemilihan Ketua OSIS (Pemilos), fasilitasi pemilu/pilkada, fasilitasi Kampung Demokrasi Pancasila, dan edukasi pendidikan politik melalui media sosial.

Pendidikan Politik Kewarganegaraan bagi Masyarakat

Pendidikan politik kewarganegaraan bagi masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang rutin diadakan oleh Kesbangpol Kota Semarang. Sasaran dalam program ini juga beragam mulai dari ASN, ormas, LSM, parpol, media, kaum perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga kaum-kaum yang jarang tersentuh pendidikan politik seperti kaum difabel. Pendidikan dan pembelajaran politik perlu diberikan agar dapat mempersiapkan kader terbaik di masyarakat yang memahami demokrasi dengan baik. Pendidikan politik bukan hanya sekadar pemberian materi atau indoktrinasi secara formal di ruangan-ruangan, namun juga mengikutsertakan masyarakat kedalam berbagai kegiatan dalam kehidupan politik (Saputro, 2016:13). Seluruh kelompok masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam kehidupan politik, sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan politik. Dalam penentuan sasaran, Kesbangpol memperhatikan isu yang sedang berkembang dimasyarakat. Jika trend isu yang ada mengenai pemilu maka sasaran utamanya tokoh agama dan tokoh masyarakat sebab merekalah yang nantinya dapat dijadikan agen untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat. Sebab seringkali masyarakat lebih mempercayai pendapat orang yang dikenalnya dibanding dengan orang yang tidak dikenal selain itu juga cara penyampaian tokoh masyarakat maupun tokoh agama dirasa mudah untuk dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Pelaksanaan dari kegiatan pendidikan politik kewarganegaraan bagi masyarakat ini dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Dalam pelaksanaan program ini dilaksanakan melalui 2 metode, yaitu secara langsung dan secara daring. Peserta yang hadir secara langsung yaitu peserta yang mendapat undangan langsung dari Kesbangpol sedangkan yang hadir secara daring merupakan peserta yang mengikuti melalui Zoom Meetings dan juga streaming Youtube, selain itu juga yang mendengarkan melalui siaran radio. Dalam melaksanakan program ini, Kesbangpol selalu menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, kalangan DPRD Kota maupun Provinsi, anggota parpol, hingga budayawan atau tokoh masyarakat. Para narasumber yang dihadirkan pun berasal baik dari tingkat lokal hingga tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kesbangpol berkomitmen untuk selalu memberikan materi-materi pendidikan politik yang berkualitas yang disampaikan langsung oleh narasumber yang berkompeten. Hal menarik yang ditemukan dari program pendidikan politik kewarganegaraan bagi masyarakat ini adalah terdapat hadiah doorprize dan uang saku bagi peserta. Hadiah doorprize diberikan kepada peserta terpilih yang aktif berdiskusi maupun bertanya ketika pelaksanaan program tersebut, dan untuk seluruh peserta yang hadir secara langsung, Kesbangpol memberikan uang pengganti transport. Hal ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat baik yang hadir secara daring maupun secara langsung agar mengikuti program tersebut. Terbukti hal tersebut da-

pat menarik masyarakat dimana peserta yang hadir secara langsung diatas 90% selain itu juga peserta yang mengikuti secara daring juga cukup banyak mencapai 30 orang lebih.

Lomba Pemilos

Lomba Pemilihan Ketua Osis (Pemilos) merupakan program pendidikan politik yang sarasannya adalah generasi muda khususnya pelajar SMA/SMK/MA sederajat di Kota Semarang. Pemuda merupakan salah satu kelompok pemilih pemula sehingga perlu untuk diberikan pendidikan politik. Tujuan dari pelaksanaan Pemilos ini sendiri yaitu memberikan pembelajaran politik dan demokrasi secara langsung kepada generasi muda khususnya para pelajar SMA sederajat. Pendidikan politik sangat penting bagi pemilih, terutama para pemilih pemula karena mereka yang akan menjadi generasi penerus pada pemilihan umum mendatang (Pasaribu;2017). Tujuan program ini tentunya sangat bagus sebab para pelajar tersebut akan menjadi pemilih pemula dalam pesta demokrasi kedepannya, sehingga sangat perlu untuk diberikan pemahaman terkait dengan pemilu. Pendidikan politik sebagai proses komunikasi bagi pemilih pemula sangat diperlukan agar mereka mempunyai pengetahuan politik yang memadai, sikap-sikap politik dan perilaku politik yang cerdas (Soep-rapto, DN, & Suparno ; 2014). Tahapan dan proses pemilos menyerupai dengan pemilu sebenarnya, dengan praktik secara langsung tentunya para pelajar akan lebih paham mengenai pemilu dibandingkan hanya dengan diberikan pengetahuan melalui seminar. Dalam pelaksanaannya program Pemilos ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan paska pelaksanaan. Setiap sekolah berlomba-lomba untuk mengadakan pemilihan Ketua Osis yang menarik, unik, dan tentunya sesuai dengan pemilu sebenarnya. Kegiatan lomba Pemilos ini sesuai dengan pendapat dari Kantaprawira (2004) bahwa bentuk penyelenggaraan pendidikan politik salah satunya melalui kegiatan yang ada disekolah, sebab sekolah memainkan peran untuk menjadi agen sosialisasi politik salah satunya melalui beragam kegiatan sekolah.

Fasilitasi Pemilu dan Pilkada

Fasilitasi pemilu dan pilkada merupakan program dari Kesbangpol yang tertuang dalam nomenklatur bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Semarang. Fasilitasi ini dilakukan hanya ketika mendekati pelaksanaan pemilu maupun pilkada Kota Semarang. Program ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu. Fasilitasi ini dilakukan dengan 2 hal yaitu dalam bentuk fisik dan dalam bentuk non fisik. Dalam bentuk fisik sendiri berupa pengadaan baliho, umbul-umbul, papan reklame, poster dan media sosialisasi pemilu lainnya. Sosialisasi pemilu yang dilakukan berupa penyampaian pesan informatif seperti tanggal pelaksanaan pemilu, cara memberikan suara, dan lain sebagainya. Untuk fasilitasi secara non fisik yaitu mengenai penertiban alat peraga kampanye. Hal ini dilakukan sebab seringkali pemasangan alat peraga kampanye oleh para paslon tidak sesuai dengan tempat yang ditetapkan oleh aturan sehingga perlu ditertibkan. Dengan berbagai kegiatan tersebut diha-

rapkan masyarakat mendapatkan berbagai informasi mengenai berbagai proses dari pemilu maupun pilkada sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu maupun pilkada nantinya.

Fasilitasi Kampung Demokrasi Pancasila

Kampung Demokrasi Pancasila adalah sebuah kampung yang terletak di Jl. Karang Tengah 2, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kampung ini dideklarasikan oleh sekitar 180 Kepala Keluarga di 3 RT di wilayah tersebut dan diresmikan pada 19 April 2019 oleh Walikota Semarang. Kampung Demokrasi Pancasila diinisiasi oleh warga sekitar yang merasa terpenggil dengan kondisi demokrasi sekarang ini yang kemudian menjalin kerjasama dengan Kesbangpol Kota Semarang. Kesbangpol Kota Semarang sangat mendukung didirikannya Kampung Demokrasi Pancasila ini, sebab dengan adanya kampung ini nantinya mereka dapat dengan mudah dan terstruktur untuk memberikan pemahaman ke masyarakat terkait nilai-nilai demokrasi Pancasila. Fasilitasi yang diberikan oleh Kesbangpol sendiri berupa pengadaan barang-barang yang menunjang untuk kampung tersebut. Kampung ini memiliki ciri khas dimana ketika masuk di Kampung ini disambut dengan gapura megah bertepatan Pancasila kemudian ketika memasuki kampung tersebut terdapat banyak pernak-pernik yang diletakkan di sepanjang jalan, tembok, hingga rumah-rumah warga. Salah satu hal yang menarik dari kampung ini adalah di sepanjang jalan banyak papan-papan bertuliskan semboyan, peribahasa, dan pesan-pesan moral. Selain itu kegiatan yang terdapat pada Kampung Demokrasi Pancasila ini menarik dan juga beragam.

Edukasi Pendidikan Politik melalui Media Sosial

Perkembangan teknologi dan informasi tentunya dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi, salah satunya media sosial. Media sosial saat ini banyak digemari oleh masyarakat. Mulai dari usia muda hingga usia tua gemar menggunakan sosial media. Media sosial dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk menyampaikan pendidikan politik. Selain karena digemari oleh berbagai kalangan usia, media sosial juga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kesbangpol Kota Semarang menggunakan media sosial sebagai perantara untuk menyampaikan edukasi pendidikan politik sebab dengan media sosial bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat dan tentunya kekinian untuk para generasi muda. Penggunaan media sosial tersebut yaitu melalui Instagram dan juga Youtube. Namun penggunaan media sosial oleh Kesbangpol dirasa belum maksimal, sebab dilihat dari konten Youtube Kesbangpol hanya terdapat 1 video yaitu video rekaman pelaksanaan salah satu kegiatan Kesbangpol. Kemudian pada Instagram Kesbangpol juga belum banyak konten yang memberikan edukasi pendidikan politik, konten edukasi pendidikan politik hanya masif ketika mendekati pelaksanaan pemilu maupun pilkada Kota Semarang. Hal ini tentunya sangat disayangkan sebab media sosial merupakan salah satu media yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam menyampaikan edukasi pendidikan politik.

Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

Pelaksanaan pendidikan politik oleh Kesbangpol tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Hal ini tidak dapat dipungkiri, sebab dalam setiap kegiatan tentunya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dari pelaksanaan pendidikan politik oleh Kesbangpol diantaranya dari segi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan kerjasama yang baik antar lembaga. Dalam segi sumber daya manusia yang dimiliki Kesbangpol dapat dikatakan sangat memadai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai dan juga pendidikan dari para pegawai Kesbangpol. Jumlah pegawai Kesbangpol sendiri berjumlah 36 orang yang terdiri dari ASN dan non-ASN. Pegawai Kesbangpol Kota Semarang merupakan lulusan SMA hingga program magister. Dalam berbagai kegiatan, para pegawai dari Kesbangpol tentunya saling bersinergi satu sama lain untuk mensukseskan program dari Kesbangpol itu sendiri. Selain didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, sumber daya finansial yang dimiliki oleh Kesbangpol juga cukup besar. Setiap bidang memiliki anggaran masing-masing, yang besarnya ditentukan oleh banyaknya program yang akan dilaksanakan pada bidang tersebut. Selain kedua hal tersebut, kerjasama antar lembaga yang baik juga menjadi salah satu faktor pendukung Kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kerjasama ini dapat dilihat dari berbagai program dari Kesbangpol yang mengikutsertakan berbagai lembaga dalam pelaksanaan programnya. Kerjasama ini tidak hanya terbatas dalam lingkup lembaga pemerintahan saja, namun juga dengan berbagai lembaga non pemerintahan. Kerjasama yang dilakukan tentunya kerjasama yang mutualisme atau saling menguntungkan antar kedua belah pihak yaitu antara Kesbangpol dengan lembaga lain. Kerjasama tersebut dilakukan tentunya guna mendukung pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Semarang.

Selain adanya faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kesbangpol. Refocusing anggaran menjadi salah satu faktor terbesar yang menghambat Kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Dengan adanya refocusing anggaran maka beberapa anggaran dialihkan untuk hal lain yang sebelumnya tidak dianggarkan seperti ketika adanya pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Hal ini mengakibatkan beberapa anggaran dari Kesbangpol tidak dapat terealisasi dan beberapa program yang direncanakan tidak dapat terlaksana. Selain hal itu tadi terdapat pula hambatan berupa pola pikir masyarakat yang kurang. Dalam hal ini yaitu beberapa peserta yang hadir ketika pelaksanaan pendidikan politik hanya sekedar memenuhi undangan dari Kesbangpol dan tidak memperhatikan materi yang diberikan dengan baik. Hal ini bisa jadi dilatarbelakangi oleh latar belakang pendidikan maupun ekonomi dari para peserta. Seperti yang disampaikan oleh Kantaprawira (2004) bahwa latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan pendidikan politik untuk masyarakat karena masyarakat itu sendiri mempunyai problem yang kompleks yang tengah dialaminya dalam kehidupannya sehingga su-

lit memahami kompleksitas politik yang ada di sekitarnya. Latar belakang pendidikan dan ekonomi hanyalah satu dari sekian banyak hambatan dalam memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Tentunya jika terdapat kesungguhan dari baik dari Kesbangpol dan masyarakat latar belakang pendidikan dan ekonomi tersebut tidaklah menjadi hambatan yang berarti

SIMPULAN

Implementasi pendidikan politik bagi masyarakat Kota Semarang yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang diwujudkan melalui berbagai program kegiatan yang dilaksanakannya. Kesbangpol Kota Semarang melaksanakan berbagai program tersebut diantaranya Pendidikan Politik Kewarganegaraan bagi masyarakat, Lomba Pemilihan Ketua OSIS, Fasilitasi Pemilu dan Pilkada, Fasilitasi Kampung Demokrasi Pancasila, dan juga Edukasi Pendidikan Politik melalui media sosial. Program-program tersebut memiliki sasaran berbagai lapisan masyarakat, mulai dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kaum Perempuan, Kaum Difabel, LSM, Ormas, Pelajar, hingga para pengguna media sosial.

Dalam melaksanakan perannya sebagai salah satu elemen pemerintah yang melaksanakan pendidikan politik, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung tersebut antara lain yaitu sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kesbangpol yang sangat memadai, kemudian sumber daya finansial yang cukup besar, serta kerjasama yang baik antar lembaga. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain yaitu, adanya refocusing anggaran sehingga beberapa program tidak dapat terlaksana serta pola pikir masyarakat yang kurang dalam hal ini peserta hanya hadir karena menghadiri undangan dan tidak memperhatikan materi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiyana, Marita. 2009. Dimensi Organizational Citizenship Behavior dalam Kinerja Organisasi. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 4. No. 2. 109-184
- Handoyo, Eko dan Puji Lestari. 2017. Pendidikan Politik. Semarang : Pohon Cahaya
- Husna, Asmaul & Fahrimal, Yuhdi. 2021. Pendidikan Politik: Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 3, No 1 (2021) Januari-Juni
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar. Bandung : Sinar Baru
- Kartono, Kartini. 2009. Pendidikan Politik Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa. Bandung : CV Mandar Maju
- Maman, Rachman & Wijayanti, Tutik. 2019. Metodologi Penelitian Pendidikan Karakter Dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Metode Campuran, Tindakan Kelas, Serta Penelitian dan Pengembangan. Semarang : LPPM
- Pasaribu, P., 2017. Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 5 (1): 51-59
- Prayudi, P. 2018. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi tentang Konsultasi Publik Masalah Pertambangan di Provinsi Bangka-Belitung dan Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*. 7(1)
- Rianto, Hadi & Rohani. 2019. Peranan PKS Dalam Memberikan Pendidikan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat 2018. *Untirta Civic Education Jurnal*. 4(2). 130-141
- Saputro, Iwan Hardi. 2016. Modernisasi Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo). *Jurnal Politika*, 7(2): 5-20
- Soeharto, Achmad. 2011. "Urgensi Pendidikan bagi Perempuan". Dalam *Muwazah* Vol 3 No. 1, hlm. 325-333
- Soeprapto, Adi. DN, Susilasti. &Suparno, Basuki Agus. 2014. Komunikasi Dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2014 di DIY. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1): 39-54
- Yoldaş, Ö. B. 2015. Civic education and learning democracy: their importance for political participation of young people. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 174, 544-549.
- Zubaidah, D., dan Munadi. 2020. Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Dalam Pendidikan Politik Untuk Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019. *Unnes Political Science Journal*. Vol 4 (2). 64-68